

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasca Perang Dingin arena politik internasional diwarnai dengan perubahan yang signifikan hingga memunculkan isu-isu baru sebagai agenda internasional seperti hak asasi manusia, lingkungan, kejahatan lintas nasional, kedaulatan dan demokratisasi. Begitu pula dengan Indonesia sebagai negara besar sekaligus anggota aktif masyarakat internasional semakin menunjukkan perhatiannya pada isu-isu transnasional yang menyentuh kepentingan nasionalnya seperti masalah isu lingkungan dan hak asasi manusia.

Kepedulian Indonesia pada masalah lingkungan terutama dengan adanya kekhawatiran akan dampak pemanasan global yang semakin parah. Apalagi Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki ribuan pulau kecil dan jutaan penduduk yang tinggal di daerah pantai rawan tenggelam akibat pemanasan global yang menyebabkan naiknya permukaan air laut. Berawal dari hal tersebut, Indonesia telah memberikan perhatiannya sejak Konferensi Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, Swedia pada tahun 1972, Konferensi Nairobi tahun 1982, dan KTT bumi 1992 dengan cara mengirimkan delegasinya pada perundingan tersebut.

Tak hanya itu saja partisipasi Indonesia dalam menanggulangi dampak pemanasan global yang semakin hari semakin membahayakan dan mengancam dunia dan seisinya. Kesadaran bersama yang mulai dirasakan

banyak negara tidak hanya Indonesia saja. Inilah, yang akhirnya membentuk kesepakatan yang utuh dan kesadaran tinggi untuk mengatasi pemanasan global yang terjadi. Partisipasi Indonesia mulai berlanjut juga pada berbagai konvensi internasional diantaranya *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969*, *Convention on International Trade in Endangered Species of World Fauna and Flora (CITES) 1973*, *Rotterdam Convention 1998* dan keikutsertaannya dalam organisasi internasional seperti UNEP. Bahkan dalam KTT bumi 1992, Presiden RI telah memimpin sendiri delegasi Indonesia sebagai wujud komitmen dan kepedulian Indonesia terhadap masalah lingkungan hidup.

Dalam upaya peningkatan citra Indonesia di mata internasional setelah keterpurukan dalam bidang ekonomi dan politik akibat proses reformasi, pemerintah memutuskan untuk mengambil peranan aktif dalam proses *World Summit on Sustainable Development (WSSD)*. Melalui upaya diplomasi di PBB dan secara bilateral, Indonesia memperoleh pengakuan dan dukungan dari masyarakat internasional untuk ditunjuk menjadi Ketua *Preparatory Committee (Prepcom) WSSD* dan menjadi tuan rumah sidang *Prepcom WSSD* terakhir pada tingkat Menteri di Bali, bulan Juni 2002. Penunjukan Indonesia sebagai Ketua *Prepcom* juga menunjukkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap kemampuan

diplomasi multilateral Indonesia dalam memimpin salah satu proses perundingan yang sangat sulit di awal millennium baru.<sup>1</sup>

Bahkan dalam seminar nasional di Jakarta tanggal 8 Februari 2001 *Administrator United Nations Development Program (UNDP)*, Mr. Malloch Brown mengemukakan bahwa keputusan Majelis Umum PBB memilih Indonesia menjadi tuan rumah *Prepcom IV WSSD* dinilai sangat tepat karena Indonesia merupakan personifikasi konsep pembangunan yang mengaitkan sekaligus aspek pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan lingkungan. Peran Indonesia sebagai Ketua *Prepcom* dan tuan rumah WSSD di Bali pada Juni 2002 dinilai akan dapat berdampak positif dalam memulihkan citra Indonesia setelah mengalami krisis. Pemulihan citra ini tentu akan meningkatkan martabat Indonesia sebagai warga bangsa yang turut serta dalam menentukan arah pembangunan global.<sup>2</sup>

Keterlibatan aktif Indonesia dalam pelaksanaan *Conference of Parties (COP)* dimulai dari pelaksanaan COP 1 hingga COP 12. Bahkan dalam COP 3 bulan Desember 1997 di Kyoto, Jepang, Indonesia juga menjadi salah satu anggota negara berkembang yang meratifikasi Protokol Kyoto. Dimana Protokol Kyoto merupakan kesepakatan emas yang mengikat bagi negara-negara dalam penanggulangan perubahan iklim yang terjadi diantaranya dengan cara menurunkan beberapa persen emisi karbon di negara tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama. Tentu

---

<sup>1</sup> Djumala, Darmanjah, *Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia (Eds.)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal.51

<sup>2</sup> *Ibid.*

hal tersebut menjadi hal yang sangat penting sekali untuk dilakukan Indonesia.

Dalam partisipasinya Indonesia bergabung dalam kelompok Negara berkembang G77 plus China. Dimana Indonesia mengambil peran aktif dan pernah mengambil posisi kepemimpinan bagi negara berkembang (G77 & China) dalam negosiasi perubahan iklim, khususnya dalam isu pendanaan untuk adaptasi dan mitigasi, teknologi transfer serta LULUCF. Indonesia perlu terus mendesak penurunan emisi negara-negara maju (Annex-1) untuk jangka pendek (2020) dan jangka panjang (2050) untuk menghindari bencana lingkungan akibat perubahan iklim yang dapat merugikan Indonesia.

Dalam hal ini, G77+China merupakan perkumpulan negara-negara berkembang yang biasa memiliki tradisi solidaritas yang kuat dikarenakan perasaan senasib pernah mengalami kolonisasi oleh negara maju. Kesamaan perjuangannya dalam memperoleh kemerdekaan dan dalam membebaskan diri dari ketergantungan Barat merupakan perekat yang efektif dalam mempersatukan negara berkembang dalam banyak forum internasional. Negara-negara ini kemudian bekerjasama membentuk Kelompok 77 (*group of 77* atau G77) yang dimulai pada tahun 1964 dalam konteks *UN Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dan terus berlanjut dalam sistem PBB. Kelompok ini beranggotakan 130 negara berkembang. China selalu mengidentifikasikan dirinya dengan G77 sehingga dalam setiap kesempatan dikenal sebagai G77+China. Dalam

Konvensi Perubahan Iklim mereka juga berupaya keras membentuk posisi bersama dalam negosiasi misalnya dalam hal mekanisme keuangan dan transfer teknologi.

Prestasi lain yang dicapai Indonesia ialah pada saat Indonesia terpilih menjadi tuan rumah dalam COP 13 *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang diselenggarakan pada 3-15 Desember 2007 di Nusa Dua, Bali. Tentu hal tersebut menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam memfasilitasi keberhasilan konferensi tersebut dan juga memperjuangkan kepentingan nasionalnya terutama untuk masalah keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia.

Konferensi ini digelar sebagai upaya lanjutan untuk menemukan solusi pengurangan efek gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Selain itu, pembicaraan juga akan membahas mengenai cara membantu negara-negara miskin dalam mengatasi pemanasan global. Konferensi Bali juga sesungguhnya merupakan bagian dari rangkaian pertemuan sebelumnya yaitu Montreal dan Nairobi, kemudian setelah Bali, Polandia dan Denmark. Namun, rangkaian pertemuan tingkat tinggi seperti *EU Summit*, G8, APEC, *High Level Meeting SMU-PBB* dan ASEAN serta *East Asia Summit* telah memberikan bobot politik dan ekspektasi yang besar agar konferensi Bali dapat menghasilkan satu persetujuan yang memetakan prosedur dan mekanisme serta panduan substansi bagi guliran proses selanjutnya sampai dengan 2009.

Konferensi Para Pihak (COP 13) pada Konvensi Kerangka Kerja Perserikataan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) berlangsung silmultan dengan Pertemuan Para Pihak Ke-3 Protokol Kyoto (MoP-3) dan seluruh acara diluar persidangan resmi dimulai pada 3-15 Desember 2007, diikuti oleh sekitar 10.000 peserta dari 187 negara ditambah dua negara pengamat, termasuk 2.000 wartawan dengan Rachmat Witoelar (Menteri Lingkungan Hidup) sebagai Presiden COP 13 dan Yvo de Boer sebagai Sekretaris Eksekutif UNFCCC. Konferensi ini akan menjadi pedoman negosiasi untuk menghasilkan perjanjian multilateral, pengganti Protokol Kyoto dalam COP 15 di Copenhagen, Denmark pada tahun 2009.<sup>3</sup>

Sebelum konferensi tersebut, beberapa tokoh melakukan lobi politik dengan negara lain untuk menghadiri perhelatan terbesar dalam lingkungan itu, salah satunya adalah dengan Amerika Serikat yang dulunya tidak mau diajak berunding. Disamping itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan beberapa pertemuan penting seperti KTT APEC di Sidney, Australia pada September 2007 dalam rangka persiapan menghadapi COP 13 di Bali nantinya. Pertemuan tersebut juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan kepentingan nasional Indonesia yang akan diangkat dalam forum tersebut nantinya.

---

<sup>3</sup> Koran kompas edisi 13 Desember 2007 hal 1

## **B. Perumusan Masalah**

*“Apa yang dilakukan Indonesia dalam mengangkat isu perubahan iklim dalam forum COP 13 di Bali?”*

## **C. Kerangka Dasar Pemikiran**

### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

Suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain berdasarkan atas politik luar negeri negara tersebut, yakni kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Politik luar negeri ditujukan untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, Kepentingan Nasional adalah:

*“Kepentingan nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan, yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi negara. Unsur itu mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.”<sup>4</sup>*

Kepentingan-kepentingan tersebut yang menjadi dasar bagi suatu negara untuk melakukan kebijakan luar negerinya. Disamping itu, pengejaran kepentingan suatu negara bisa tergantung dari sumber daya alam yang tersedia untuk dapat memaksa atau meyakinkan negara lain untuk dapat bekerjasama dalam satu ruang lingkup, dimana semua

---

<sup>4</sup> Jack C Plano, Roy Olton, *The International Dictionary*, Terj. Wawan Juanda, The Third Edition, Clio Press Ltd, England, 1982, hal.7

negara memiliki kepentingan masing-masing. Konsep kepentingan ini berkaitan dengan adanya cita-cita serta tujuan tertentu dari suatu negara yang berusaha dicapai melalui hubungan serta kerjasama yang solid dan harmonis dengan negara lain.

Diplomasi yang ditempuh Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim tersebut di dukung dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki berupa hutan tropis dan jutaan jenis terumbu karang yang luas, menjadikan Indonesia mempunyai posisi yang kuat dalam posisi tawar menawar dengan negara lain untuk diajak bekerjasama terutama dengan negara berkembang.

## **2. Konsep Diplomasi Lingkungan**

Konsep Diplomasi Lingkungan ini berasal dari dua kata yaitu diplomasi dan lingkungan, berikut ini pengertian diplomasi dan lingkungan:

Secara garis besar menurut S.L Roy, Diplomasi adalah

*“Diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Definisi tersebut jika ditinjau dari konteks hubungan internasional tampaknya lebih mengena. Tetapi secara konvensional, diplomasi diartikan sebagai salah satu usaha untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dikalangan masyarakat internasional”<sup>5</sup>*

Berdasarkan pengertian dari Undang-Undang Dasar No.23 Tahun 1997 menyatakan bahwa:

---

<sup>5</sup> K.J. Holsti, *International Politics A Frame Work For Analysis Third edition*, Practice Hall of India, New delhi, 1978, hal.82-83

*“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perilaku kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”*

Sedangkan menurut Harold dan Margaret Sprouts dalam Teori Lingkungan “*A Man Millieu Relationship*” mengatakan bahwa:

*“Faktor lingkungan sangat mempengaruhi suatu masyarakat politik dalam menentukan kebijakan politiknya. Masyarakat politik memiliki basis geografis untuk menerangkan tingkah laku politik. Masing-masing masyarakat politik terletak pada suatu wilayah yang merupakan kombinasi unik dalam hal lokasi, ukuran, bentuk, iklim, dan sumber-sumber alamnya. Disamping itu sebagian besar aktivitas manusia dipengaruhi oleh distribusi yang tidak rata dari sumber-sumber human dan non human.”<sup>6</sup>*

Membahas lingkungan hidup tidak hanya dibatasi pada satwa dan tanaman saja akan tetapi juga segala sesuatu seperti yang menyangkut benda hidup (biotik) dan benda mati (abiotik). Sehubungan sifat dinamisnya lingkungan hidup maka akan terus muncul dan berkembang melalui berbagai isu-isu baru lingkungan hidup dan berkembang melalui berbagai isu-isu baru lingkungan hidup yang sifatnya holistik, kausatif dan saling terkait dalam suatu sistem.

Menurut Andreas Pramudianto menjelaskan bahwa diplomasi dan lingkungan hidup merupakan istilah yang dapat dikaitkan dan berkembang menjadi Diplomasi Lingkungan (*Environmental Diplomacy*) sehingga pengertiannya menjadi:

---

<sup>6</sup> James E. Dougherty, Robert I. Pfaltzgraf, Jr, *Contending Theories of International Relations : A Comprehensive Survey*, Third Edition, Harper Collins Publisher, New York, 1990

*“Ilmu dan seni yang mempelajari dan menangani isu-isu lingkungan hidup untuk mencapai kesesuaian dengan kepentingan nasional (atau kepentingan dan kebijakan entitas bukan negara) terutama kebijakan politik luar negeri dan politik dalam negeri di bidang lingkungan hidup suatu negara”<sup>7</sup>*

Sehingga diplomasi lingkungan dapat mencakup dari persoalan pencemaran udara, limbah B3, pencemaran laut, perdagangan satwa langka, perubahan iklim, bioteknologi dan keamanan hayati hingga persoalan-persoalan seperti nuklir, pemukiman, pembangunan berkelanjutan, sumber daya air, energi dan lain-lain.

Merujuk pada kerangka teori dari Harold dan Margaret Sprouts tentang sebagian besar aktivitas manusia dipengaruhi oleh distribusi yang tidak rata dari sumber-sumber *human* dan *non human*, dan faktor-faktor yang *human* dan *non human* itu mempengaruhi kegiatan manusia hanya dalam dua segi. Pertama, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil manusia hanya jika manusia memperhatikannya. Kedua, faktor-faktor itu dapat membatasi tindakan individu atau hasil keputusan berdasarkan persepsi-persepsi tentang lingkungan.

Sebagai masyarakat politik tentunya Indonesia mempunyai wilayah geografis dimana wilayah geografis tersebut nantinya yang akan mendukung Indonesia dalam menjalankan aktivitas kegiatan industri maupun ekonomi untuk memenuhi dan mensejahterakan rakyatnya.

---

<sup>7</sup> Pramudianto, Andreas , *Diplomasi Lingkungan:Teori dan Fakta*,UI-Press, Jakarta, 2008, hal 20

Dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, Indonesia tentunya memanfaatkan faktor lingkungan *human* sebagai pelaku dan pelaksana kegiatan ekonomi maupun pembangunan. Sedangkan faktor lingkungan *non human* seperti sumber daya alam baik migas maupun non migas dimanfaatkan sebagai kekayaan alam dan sumber penghasilan serta sarana pendukung dalam kegiatan ekonomi dan proses pembangunan negara demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor *human* dan *non human* menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Indonesia dalam memelihara dan menjaga alamnya.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang dan didukung oleh kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, penulis menarik hipotesa bahwa: Indonesia memberikan usulan program *Forestry Eleven* (F-11), *Coral Triangle Initiative* (CTI) dan *Bali Roadmap* sebagai isu-isu yang diangkat dalam forum COP 13.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin memberikan eksplanasi atau penjelasan tentang perkembangan diplomasi lingkungan Indonesia selama ini.

2. Ingin memberikan eksplanasi atau penjelasan tentang usulan yang diangkat Indonesia dalam forum COP 13 sebagai bentuk partisipasi Indonesia terhadap lingkungan.
3. Ingin menjelaskan eksplanasi tentang dampak / implikasi dari diangkatnya usulan tersebut terhadap kepentingan nasional Indonesia
4. Aplikasi teori-teori yang pernah penulis pelajari selama mengikuti perkuliahan
5. Melengkapi persyaratan menyelesaikan jenjang studi Strata 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dari awal 2007 khususnya pada pelaksanaan KTT APEC di Sidney, Australia dimana Indonesia mengajukan beberapa inisiatif berupa *Forestry Eleven* (F-11) dan *Coral Triangle Initiative* (CTI) hingga pelaksanaan COP 13 yang menghasilkan Bali Roadmap yang menjadi puncak perjuangan Indonesia sebagai upaya mengangkat isu perubahan iklim sebagai isu diplomasi barunya. Namun tidak tertutup kemungkinan untuk memasukkan data-data di luar jangka waktu tersebut untuk mendukung penelitian ini.

## **G. Metode Pengumpulan Data**

Analisa terhadap permasalahan ini dilakukan melalui studi pustaka dengan cara mengumpulkan, pemilihan dan mengkaji data-data, pendapat serta informasi yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar dan juga internet.

## **H. Sistematika Penulisan**

- BAB I Menjelaskan tentang pendahuluan yang memuat tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan
- BAB II Menjelaskan tentang perubahan iklim dan dampaknya pada sebelum COP 13
- BAB III Menjelaskan tentang perjalanan diplomasi lingkungan Indonesia sebelum COP13
- BAB IV Menjelaskan tentang usulan yang diberikan Indonesia dalam COP 13 di Bali, yaitu program *Forestry Eleven* (F-11), *Coral Triangle Initiative* (CTI) dan *Bali Roadmap*
- BAB V Kesimpulan, merupakan rangkuman pada bab-bab sebelumnya, juga berisi penegasan argumen yang digunakan

**BAB II**  
**PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA**  
**PADA SEBELUM COP 13**

Perubahan iklim yang disebabkan oleh adanya pemanasan global mulai meresahkan masyarakat dunia. Di belahan dunia yang lain hujan turun sangat deras, sedangkan di belahan dunia yang lain, kekeringan tak juga berhenti. Banyak gejala alam tersebut yang kemudian menjadi titik awal timbulnya gejala alam yang lain seperti munculnya banyak penyakit, banjir yang munculnya tiba-tiba, tanah longsor, badai, angin rebut dan sebagainya. Hal tersebut yang kemudian menjadi perhatian banyak pihak terutama bagi beberapa negara-negara yang mulai terancam keutuhan wilayahnya karena pemanasan global yang terjadi. Belum lagi perubahan iklim juga berdampak pada perkembangan sosial dan politik kehidupan bernegara diantaranya terjadinya beberapa konflik antar kelompok yang berkembang menjadi konflik antara negara. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dijelaskan dampak pemanasan global dan pertemuan internasional sebagai aksi dan reaksi negara-negara di dunia dalam penanggulangan pemanasan global.

**A. Dampak Pemanasan Global**

Perubahan iklim secara ekstrim, meningkatnya suhu bumi, bencana alam yang terus datang mengancam, krisis cadangan energi dan air, adalah sederet persoalan global yang mengancam terjadinya *global chaos*, yang